

## Dukung Kadernya

DPD partai Golkar Kabupaten Mempawah mendukung, kadernya menindaklanjuti temuan proyek jalan Pertanian di Desa Semparong yang tidak melalui proses lelang.

"Kami sangat mendukung, Jika terbukti menyalahi aturan sesuai Kepres 80, kasus itu akan kita bawa ke ranah hukum untuk diproses," tegas Herman APSE, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Mempawah.

Ketua Komisi D DPRD itu mengaku, menerima laporan dari kader dilapangan. Karenanya, secara kepartaian sangat didukung. Hasil itu juga akan ditindaklanjuti kepada Bupati sebagai pengguna pejabat SKPD untuk menilai. Sebab, kasus seperti itu yang terjadi ada Dinas P3K khususnya bidang pertanian dan holtikultura Dinas Pertanian, peternakan, Kehutanna dan Perkebunan sudah dua kali.

"Kitasayangkan dan pasca bencana yang Rp15 miliar yang seyogyanya diperuntukan di Desa Pasir akhirnya batal. Yang rugi kan masyarakat," nilainya. Sementara Empat Anggota Komisi B DPRD kelapangan, dipimpin Ketua Komisi B, Safruddin Aksa SE, melihat dari dekat adanya dugaan pekerjaan proyek yang belum ada tender terbuka tetapi sudah dikerjakan. Yakni proyek jalan produksi pertanian Desa Semparong Kecamatan Sungai Kunyit.

"Kami sudah cross check dan memang benar ada pekerjaan penimbunan jalan yang disinyalir salah satu proyek jalan produksi pertanian di Desa Semparong, kecamatan Sui Kunyit. hasil temuan kami dilapangan ini, akan tindaklanjuti," janji komisi B.

Legislator Partai Golkar yang bernaung di fraksi Gohan itu menjelaskan, saat dilapangan pihaknya didampingi perangkat desa setempat. Juga ada Ketua RT dan mantan Kades, M Arif. Keduanya membenarkan kalau jalan telah dikerjakan sejak sebulan lalu.

"Masyarakat tidak tahu pasti apakah jalan itu proyek Pemda atau bukan. Pihaknya akan adakan rapat kerja dengan dinas terkait. Untuk mendapatkan penjelasan dan kepastian realisasi proyek," kata dia.

Jika proyek itu dari APBD, Komisi B akan mengambil sikap tegas. Sebab, realisasi proyek telah menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku. Tahapan pelaksanaan proyek tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

"Jika dugaan itu benar, oknum yang bermain mengatur pekerjaan proyek, akan kita masalahkan. Terlebih, lelang proyek di dinas bersangkutan belum mulai. Indikasi ada oknum yang bertanggung jawab dalam kasus ini dapat dipidanakan," tegasnya. Bukan hanya itu, timpal Safruddin, jika dugaan pengaturan proyek itu terbukti maka pihaknya akan melibatkan aparat penegak hukum. Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran dalam realisasi proyek.

"Selain menyalahi aturan dan prosedur realisasi proyek, adanya dugaan mark-up anggaran. Seperti proyek pengadaan Alat Pertanian (Alsintan) Rp 900 juta untuk 22 unit peralatan. Harusnya dana sebesar itu bisa beli lebih banyak alsintan," nilai Safrudin.

Senada itu, Anggota Komisi B, Darwis Sanjaya menegaskan, kunjungan lapangan yang dilaksanakan pihaknya bukan semata-mata mencari kesalahan pekerjaan proyek di masyarakat. Melainkan menindaklanjuti aspirasi serta melaksanakan fungsi pengawasannya selaku wakil rakyat.

"Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan informasi. Hendaknya tindakan tersebut dapat ditiru oleh pihak lain dalam mendukung kinerja kami. Misalnya HKTI dan elemen lainnya, bukan malah melakukan pembohongan publik atau menutup-nutupi informasi yang benar," cetusnya. (ham)